

ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA UD. ABC

Alfred Salindeho ^{*)}

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung,
Sulawesi Utara, Indonesia

^{*)} E-mail Penulis Korespondensi: alfred.salindeho@gmail.com

ABSTRAK

Koreksi fiskal merupakan pembetulan pencatatan keuangan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan UD. ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan badan, jenis koreksi fiskal yang dilakukan, dan dampak dari koreksi fiskal terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang UD. ABC. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan komersial UD. ABC, melakukan koreksi fiskal, dan menentukan besarnya pajak penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak penghasilan badan UD. ABC belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal yang dilakukan dalam bentuk koreksi positif, dan dampak terhadap pajak terutang menambah pajak terutang. Dampak koreksi fiskal tersebut dapat menambah Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Terutang, dan dapat mengurangi laba bersih UD. ABC.

Kata kunci: Koreksi fiskal; Laporan keuangan; Pajak penghasilan Badan.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak (Singgih dan Widjaja, 2020). Pajak digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran Negara (Ainiyah, 2018). Sumber penerimaan dari sector pajak salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan dalam tahun pajak (Lambidju, Elim dan Suwetja, 2021).

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya (Sinambela, 2019). Setiap badan yang bertempat atau didirikan di Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri dan objek pajak adalah penghasilan atau usaha yang didapatkan oleh badan (Kahar dan Gunawan, 2020). Wajib pajak badan berkewajiban menyetor, menghitung dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan (Louis, 2020).

Penghasilan yang diperoleh oleh Badan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan, Badan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan atau disebut dengan laporan keuangan komersial (Langsa,

2017). Namun, dalam memenuhi kebutuhan ketentuan perpajakan maka laporan keuangan komersil harus dilakukan koreksi fiskal (Watuseke *et al.*, 2019).

Koreksi fiskal merupakan suatu aktivitas pembetulan pencatatan keuangan yang akan dilaporkan oleh wajib pajak (Dhiya'Ulhaq, 2021). Biasanya revisi akan dilakukan apabila draft laporan tidak sesuai dengan format yang menjadi standar perpajakan (Languju *et al.*, 2014). Koreksi fiskal juga dapat diartikan sebagai tindakan penyesuaian draft keuangan wajib pajak dengan standar pajak sebelum biaya pajak disetorkan (Kumalawati, 2018). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang muncul karena terjadinya kesalahan antara pengelolaan akuntansi komersial penghasilan dengan pajak (Sondakh, 2016). Tujuan untuk dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk menyesuaikan besarnya laba menurut standar akuntansi keuangan dan besarnya laba menurut undang-undang perpajakan (Tulandi *et al.*, 2018).

Perusahaan UD. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan. Perusahaan ini telah memiliki laporan keuangan yang telah mencatat setiap transaksi yang terdapat dalam perusahaan UD. ABC. Perusahaan ini juga telah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan telah melakukan pembayaran pajak untuk setiap transaksi yang dikenai pajak. Namun, selama ini UD. ABC belum pernah melakukan koreksi fiskal. Perusahaan menghitung pajak penghasilan badan terutang berdasarkan laporan keuangan komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan UD ABC dengan peraturan perpajakan dalam melaporkan pajak terutangnya dengan koreksi fiskal yang dilakukan; serta menganalisis dampak dari koreksi fiskal yang dilakukan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di UD. ABC Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada April sampai Juni 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan UD ABC periode tahun 2019 – 2020. Pemilihan laporan keuangan menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti memilih laporan keuangan terbaru yang sudah disusun oleh UD ABC.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif kuantitatif sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode deskriptif karena peneliti menelaah laporan keuangan yang disusun oleh UD ABC yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi serta mengambil kesimpulan koreksi fiskal yang dilakukan oleh UD ABC. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan keuangan UD ABC. Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah laporan keuangan, melakukan perhitungan koreksi fiskal, yang selanjutnya membuat laporan keuangan yang sudah di koreksi dan menentukan besarnya pengaruh koreksi fiskal terhadap PPh Badan UD ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Laporan Keuangan UD. ABC

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan, atau dapat dikatakan laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan serta kinerja perusahaan. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi yang ada di perusahaan.

Proses penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh UD. ABC adalah laporan neraca (*balance sheet*) dan laporan laba/rugi (*income statement*). Laporan neraca merupakan sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, ekuitas dan kewajiban perusahaan sesuai tanggal transaksi, dengan tujuan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Sementara itu, laporan laba/rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban yang ada di perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.

Laporan keuangan sebelum koreksi fiskal dan sesudah koreksi fiskal memiliki jumlah yang berbeda, hal itu dikarenakan sifat dari koreksi fiskal yaitu menambah jumlah laporan komersial atau mengurangi jumlah laporan komersial sehingga hasil sebelum dikoreksi fiskal akan berbeda dengan hasil sesudah dikoreksi fiskal. Berikut ini adalah data laporan keuangan UD. ABC sebelum dikoreksi fiskal untuk tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1. Laporan Neraca UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)

No. Akun	Nama Akun	Januari - Desember	
		2019	2020
1101.01.000	Kas	138.907.908	120.514.849
1102.00.000	Bank	44.005.000	44.005.000
1103.01.000	Piutang Usaha	129.562.263	1.023.100.058
1103.04.000	PRIVE	273.310.000	84.500.000
1104.01.000	Persediaan Ikan	319.807.000	126.692.000
1104.02.000	Persediaan Karton dan Plastik	93.058.952	97.000.605
1106.03.000	Pajak Dibayar Dimuka PPh 25	55.776.900	63.366.000
1106.04.000	Pajak Dibayar Dimuka PPh 22	27.213.451	53.631.299
1200.00.000	AKTIVA TETAP	240.000.000	243.635.000
1201.01.000	Material	484.943.500	-
1201.02.000	Ongkos bas/Borongan	355.375.000	-
1201.03.000	BANGUNAN BARU (lainnya)	233.306.500	1.073.625.000
1300.00.000	AKUMULASI PENYUSUTAN	-	(54.892.917)
2101.01.000	Hutang Dagang	(764.766.600)	-
2101.02.000	Hutang Gaji	(33.150.000)	(33.150.000)
2101.05.001	Hutang Pph pasal 21/26	(257.000)	(206.800)
2101.05.002	Hutang Pph Pasal 25	-	(5.264.000)
2101.05.003	Hutang Pph Pasal 29	-	(3)
2101.05.006	Hutang Sewa Bangunan	-	(200.000.000)
2101.08.000	Hutang Jamsostek	(2.415.450)	(1.767.845)
3100.00.000	MODAL	(556.247.507)	(795.563.732)
3102.00.000	Saldo Laba / Laba ditahan	(795.767.848)	(2.171.449.133)
3103.00.000	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	(242.662.069)	330.487.094

Sumber: Data Laporan Neraca UD. ABC, diolah 2021

Tabel 1 menampilkan laporan keuangan neraca perusahaan UD. ABC selama tahun 2019 dan tahun 2020. Laporan tersebut adalah laporan keuangan komersial atau laporan keuangan yang belum memiliki koreksi fiskal. Tabel 2 menampilkan laporan keuangan laba rugi perusahaan UD. ABC selama tahun 2019 dan 2020. Laporan tersebut adalah laporan keuangan komersial atau laporan keuangan yang belum memiliki koreksi fiskal.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. UD. ABC memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan atau investor yang ada di Jakarta, sehingga UD. ABC sangat memerlukan laporan keuangan untuk menjadi laporan kepada investor tentang kondisi keuangan perusahaan selama tahun berjalan. Dari laporan neraca dan laporan laba rugi dapat terlihat keadaan atau kondisi keuangan yang ada di UD. ABC.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)

No. Akun	Nama Akun	Januari - Desember	
		2019	2020
4101.00.000	Penjualan	(10.885.380.502)	(21.452.519.000)
5101.00.000	Persediaan Awal	61.765.000	319.807.000
5102.02.002	Pembelian Ikan	8.217.176.050	16.518.168.700
5103.00.000	Biaya Tenaga Kerja Langsung	295.206.000	633.180.000
5104.00.000	Biaya Operasional processing	55.539.650	80.663.200
5104.00.001	Biaya Sewa Gudang	200.000.000	200.000.000
5104.00.002	Biaya Pemeliharaan Bangunan	82.488.500	283.525.600
5105.00.000	Biaya Pemakaian Karton & Plastik	503.991.598	587.113.473
5106.00.000	Persediaan Barang Akhir	(319.807.000)	(126.692.000)
5107.00.000	Biaya Listrik Pabrik	526.122.050	855.965.550
5108.00.000	Biaya Ekspedisi	65.387.000	244.950.000
5109.00.000	Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung	4.400.000	-
6100.00.000	BEBAN OPERASIONAL	68.008.000	89.077.510
6100.01.000	Beban Jamsostek	29.070.660	25.429.350
6101.00.000	BEBAN PEGAWAI	-	-
6101.01.000	Upah Staff	331.500.000	420.000.000
6101.02.000	THR Staff	63.737.500	78.500.000
6103.00.000	BEBAN KANTOR	-	-
6103.01.000	Beban Alat Tulis Kantor	1.172.300	-
6103.02.000	Beban Perlengkapan Kantor	3.137.200	962.500
6103.03.000	Beban Photocopy	739.500	969.500
6103.05.000	Administrasi kantor	1.059.000	8.277.300
6103.06.000	Beban pajak daerah	5.395.000	6.192.000
6103.07.000	Beban air, listrik, telepon	8.715.100	9.508.400
6103.08.000	Beban Transport	3.400.000	1.550.000
6103.09.000	Beban Konsultan	65.000.000	71.000.000
6103.10.000	Beban Pos dan Kurir	174.000	2.588.500
6105.00.000	BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI	-	53.681.250
6105.01.000	Beban penyusutan peralatan dan inventaris kantor	-	1.211.667
6107.01.000	Beban PPh Pasal 21	2.940.000	1.593.550
6107.05.000	Beban PPN	21.472.700	-
6107.06.000	Beban PPh	2.503.356	-
6108.00.000	BEBAN MAKAN DAN MINUM	62.977.000	84.054.000
6109.01.000	Beban Sumbangan	3.500.000	600.000
TOTAL		(518.610.338)	(900.641.950)

Sumber: Data Laporan Laba Rugi UD. ABC, diolah 2021

Koreksi Fiskal

Sebelum laporan keuangan dilaporkan ke dirjen pajak maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau pengecekan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Apabila didapatkan ada transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan komersial dengan laporan perpajakan.

Dalam laporan keuangan UD. ABC terdapat transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Laporan keuangan perusahaan UD. ABC yang akan dikoreksi fiskal ialah laporan laba rugi, dimana terdapat transaksi-transaksi atau akun-akun yang memiliki perbedaan pengakuan atau perlakuan atas biaya-biaya yang ada dilaporkan keuangan komersial dengan laporan pajak. Gabungan laporan keuangan UD. ABC untuk tahun 2019 dan 2020 yang akan dikoreksi fiskal, adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Laporan Gabungan Koreksi Fiskal UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)

No	Nama Akun Yang Dikoreksi Fiskal	Laporan Keuangan		Koreksi Fiskal			
		2019	2020	Beda Tetap (2019)	Positif (2019)	Beda Tetap (2020)	Positif (2020)
1.	Beban PPh Pasal 21	2.940.000	1.593.550		2.940.000		1.593.550
2.	Beban PPN	21.472.700			21.472.700		
3.	Beban PPh	2.503.356			2.503.356		
4.	Beban Sumbangan	3.500.000	600.000	3.500.000		600.000	
Jumlah					30.416.056		2.193.550

Sumber: Data primer, diolah 2021

Tabel 4 menunjukkan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke dirjen pajak untuk tahun 2019 yang telah memiliki koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan dan penambahan penghasilan ini, termasuk dalam kategori perbedaan beda tetap yaitu dimana biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan untuk akuntansi pajak dan koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang disebabkan oleh penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hardianti (2019) yang menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba kena pajak atau pajak terutang bertambah.

Tabel 4. Laporan Keuangan Neraca UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2019

UD. ABC
Neraca Per 31 Desember 2019

Aktiva			Pasiva		
Aktiva Lancar					
Kas	Rp.	138.907.908	Hutang Dagang	Rp.	569.456.600
Bank	Rp.	44.005.000	Hutang Gaji	Rp.	33.150.000
Piutang Usaha	Rp.	129.562.263	Hutang Pajak	Rp.	39.227.803
Persediaan Ikan	Rp.	319.807.000	Hutang Jamsostek	Rp.	2.415.450
Persediaan Lainnya	Rp.	93.058.952	Hutang Sewa	Rp.	100.000.000
Total Aktiva Lancar	Rp.	725.341.123	Total Hutang	Rp.	744.249.853
Aktiva Tetap					
Daftar Harta	Rp.	240.000.000	Modal	Rp.	795.563.732
Bangunan Baru	Rp.	1.073.625.000	Laba Berjalan	Rp.	499.152.538
Total Aktiva Tetap	Rp.	1.313.625.000			
Total Aktiva	Rp.	2.038.966.123	Total Pasiva	Rp.	2.038.966.123

Sumber: Data primer, diolah 2021

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan akan menambah penghasilan neto, yang kemudian penghasilan tersebut akan dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil dari Penghasilan Kena Pajak akan dikenai tarif pajak untuk memperoleh Pajak Terutang.

Tabel 5. Laporan Keuangan Laba Rugi UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2019

UD. ABC	
Laporan Rugi Laba	
Januari s.d. Desember 2019	
Penjualan	Rp. 10.885.380.502
Hpp	
Persediaan Awal	Rp. 61.765.000
Pembelian Ikan	Rp. 8.217.176.050
Persediaan Akhir	Rp. (319.807.000)
Total Harga Pokok Penjualan	Rp. 7.959.134.050
Lab. Kotor	Rp. 2.926.246.452
Biaya – Biaya	
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp. 295.206.000
Biaya Operasional processing	Rp. 55.539.650
Biaya Sewa Gudang	Rp. 200.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan	Rp. 82.488.500
Biaya Pemakaian Karton dan Plastik	Rp. 503.991.598
Biaya Listrik Pabrik	Rp. 526.122.050
Biaya Ekspedisi	Rp. 65.387.000
Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung	Rp. 4.400.000
Upah Staff	Rp. 331.500.000
THR Staff	Rp. 63.737.500
Total Biaya	Rp. 2.128.372.298
Beban Umum & Administrasi	
Beban Operasional	Rp. 68.008.000
Beban Jamsostek	Rp. 29.070.660
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 1.172.300
Beban Perlengkapan Kantor	Rp. 3.137.200
Beban Photocopy	Rp. 739.500
Administrasi kantor	Rp. 1.059.000
Beban pajak daerah	Rp. 5.395.000
Beban air, listrik, telepon	Rp. 8.715.100
Beban Transport	Rp. 3.400.000
Beban Konsultan	Rp. 65.000.000
Beban Pos dan Kurir	Rp. 174.000
Beban PPh Pasal 21	Rp. 2.940.000
Beban PPN	Rp. 21.472.700
Beban PPh	Rp. 2.503.356
Beban Makan Dan Minum	Rp. 62.977.000
Beban Sumbangan	Rp. 3.500.000
Total Beban Umum & Administrasi	Rp. 279.263.816

UD. ABC
Laporan Rugi Laba
Januari s.d. Desember 2019

Laba Komersial		Rp. 518.610.338
Koreksi Fiskal	Rp. 30.416.056	
Penghasilan Neto		Rp. 549.026.000
PTKP (K/2)		Rp. 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 481.526.000
Pajak Terutang		Rp. 90.381.500
Laba Bersih		Rp. 428.228.838
<u>Perhitungan Pajak Yang Harus Dibayar</u>		
<i>Pph Terutang Tahun 2019</i>	Rp. 90.381.500	
<i>Angsuran PPh 25 Tahun 2019</i>	Rp. 58.636.544	
<i>Kredit Pajak PPh 22</i>	Rp. 27.213.453	
Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 4.531.503	
PPH 25 Tahun 2020	Rp. 5.264.000	

Sumber: Data primer, diolah 2021

Setelah memperoleh nilai pajak terutang, maka Laba Komersial dikurangi dengan Pajak Terutang akan memperoleh hasil Laba Bersih. Untuk perhitungan Pajak Yang Masih Harus Dibayar diperoleh dari PPh Terutang tahun 2019 dikurangi Angsuran PPh 25 selama tahun 2019 dan dikurangi juga dengan Kredit Pajak PPh 22. Sementara itu, untuk PPh 25 tahun 2020 diperoleh dari PPh Terutang tahun 2019 dikurangi Kredit Pajak PPh 22, kemudian total tersebut dibagi 12 bulan. Jumlah yang diperoleh adalah biaya PPh 25 yang harus dibayarkan selama 12 bulan untuk periode tahun 2020. Setelah semua hasil telah diperoleh maka laporan keuangan untuk tahun 2019 telah siap untuk dilaporkan ke dirjen pajak.

Tabel 6. Pajak Terutang Menurut Ketentuan Perpajakan Tahun 2019

DPP		Nilai Pajak Terutang
50.000.000	5%	2.500.000
200.000.000	15%	30.000.000
<u>231.526.000</u>	25%	<u>57.881.500</u>
481.526.000		90.381.500

Sumber: Data primer, diolah 2021

Selanjutnya, akun-akun yang akan dikoreksi fiskal pada Laporan Laba Rugi tahun 2020, sebagaimana dalam Tabel 3, yaitu sejumlah Rp. 2.193.550, sehingga bentuk laporan keuangan sebelum dilaporkan ke dirjen pajak adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Laporan Keuangan Neraca UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2020

UD. ABC			
Neraca Per 31 Desember 2020			
Aktiva		Pasiva	
Aktiva lancar			
Kas	Rp. 120.514.849	Hutang gaji	Rp. 33.150.000
Bank	Rp. 44.005.000	Hutang pajak	Rp. 237.701.304
Piutang usaha	Rp. 1.023.100.058	Hutang jamsostek	Rp. 1.767.845
Persediaan ikan	Rp. 126.692.000	Hutang sewa	Rp. 200.000.000
Persediaan lainnya	Rp. 97.000.605	Hutang usaha	Rp. (1.737.524)
Total aktiva lancar	Rp. 1.411.312.512	Total hutang	Rp. 470.881.625
Aktiva tetap			
Daftar harta	Rp. 243.635.000	Modal	Rp. 1.139.292.570
Bangunan	Rp. 1.073.625.000	Laba berjalan	Rp. 1.063.505.400
Akumulasi peny.	Rp. (54.892.917)		
Total aktiva tetap	Rp. 1.262.367.083		
Total aktiva	Rp. 2.673.679.595	Total Passiva	Rp. 2.673.679.595

Sumber: Data primer, diolah 2021

Tabel 8. Laporan Keuangan Laba Rugi UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2020

UD. ABC	
Laporan Rugi Laba	
Januari s.d Desember 2020	
Penjualan	Rp. 21.452.519.000
Hpp:	
Persediaan awal	Rp. 319.807.000
Pembelian ikan	Rp. 16.518.168.700
Persediaan akhir	Rp. (126.692.000)
Total harga pokok penjualan	Rp. 6.711.283.700
Laba kotor	Rp. 4.741.235.300
Biaya - Biaya	
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp. 633.180.000
Biaya Operasional processing	Rp. 80.663.200
Biaya Sewa Gudang	Rp. 200.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan	Rp. 383.525.600
Biaya Pemakaian Karton dan Plastik	Rp. 587.113.473
Biaya Listrik Pabrik	Rp. 855.965.550
Biaya Ekspedisi	Rp. 244.950.000
Upah Staff	Rp. 420.000.000
THR Staff	Rp. 78.500.000
Total Biaya	Rp. 3.012.897.823

UD. ABC
Laporan Rugi Laba
Januari s.d Desember 2020

Beban umum & administrasi		
Beban operasional	Rp.	89.077.510
Beban Jamsostek	Rp.	25.429.350
Beban Perlengkapan Kantor	Rp.	962.500
Beban Photocopy	Rp.	969.500
Administrasi kantor	Rp.	8.277.300
Beban pajak daerah	Rp.	6.192.000
Beban air, listrik, telepon	Rp.	9.508.400
Beban Transport	Rp.	1.550.000
Beban Konsultan	Rp.	71.000.000
Beban Pos dan Kurir	Rp.	2.588.500
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp.	54.892.917
Beban PPh Pasal 21	Rp.	1.593.550
Beban Makan Dan Minum	Rp.	84.054.000
Beban Sumbangan	Rp.	600.000
Total Beban Umum & Administrasi	Rp.	356.695.527
Laba komersial		Rp. 900.641.950
Koreksi fiskal	Rp.	2.193.550
Penghasilan neto		Rp. 902.835.000
PTKP (K/2)		Rp. 67.500.000
Penghasilan kena pajak		Rp. 835.335.000
Pajak terutang		Rp. 195.600.500
Laba bersih		Rp. 705.041.450
<u>Perhitungan Pajak Yang Harus Dibayar</u>		
<i>Pph Terutang Tahun 2020</i>	Rp.	195.600.500
<i>Angsuran PPh 25 Tahun 2020</i>	Rp.	63.366.900
<i>Kredit Pajak PPh 22</i>	Rp.	53.631.301
Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp.	78.602.299
PPh 25 Tahun 2021	Rp.	11.830.000

Sumber: Data primer, diolah 2021

Tabel 7 menunjukkan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke dirjen pajak untuk tahun 2020, dan Tabel 8 adalah laporan laba/rugi yang telah memiliki koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan dan penambahan penghasilan, koreksi ini termasuk dalam kategori perbedaan beda tetap yaitu dimana biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan untuk akuntansi pajak dan koreksi fiskal positif

yaitu koreksi fiskal yang disebabkan oleh penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan akan menambah penghasilan neto, yang kemudian penghasilan tersebut akan dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil dari Penghasilan Kena Pajak akan dikenai tarif pajak untuk memperoleh Pajak Terutang.

Tabel 9. Pajak Terutang Menurut Ketentuan Perpajakan Tahun 2020

DPP		Nilai Pajak Terutang
50.000.000	5%	2.500.000,00
200.000.000	15%	30.000.000,00
250.000.000	25%	62.500.000,00
<u>847.426.000</u>	30%	<u>254.227.800,00</u>
1.347.426.000		349.227.800,00

Sumber: Data primer, diolah 2021

Setelah memperoleh nilai pajak terutang maka Laba Komersial dikurangi dengan Pajak Terutang akan memperoleh hasil Laba Bersih. Untuk perhitungan Pajak Yang Masih Harus Dibayar diperoleh dari PPh Terutang tahun 2020 dikurangi Angsuran PPh 25 selama tahun 2020 dan dikurangi juga dengan Kredit Pajak PPh 22. Sementara itu, untuk PPh 25 tahun 2021 diperoleh dari PPh Terutang tahun 2020 dikurangi Kredit Pajak PPh 22, kemudian total tersebut dibagi 12 bulan. Jumlah yang diperoleh adalah biaya PPh 25 yang harus dibayarkan selama 12 bulan untuk periode tahun 2021. Setelah semua hasil telah diperoleh maka laporan keuangan untuk tahun 2020 telah siap untuk dilaporkan ke dirjen pajak.

SIMPULAN

Laporan keuangan yang dimiliki oleh UD. ABC belum sesuai dengan peraturan pajak sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang dilakukan termasuk dalam bentuk koreksi beda tetap karena terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, dan koreksi fiskal positif karena penghasilan yang dikoreksi fiskal memiliki sifat menambah. Karena koreksi fiskal yang dilakukan bersifat menambah, sehingga jumlah penghasilan neto akan didapat dari jumlah laba komersial ditambah dengan koreksi fiskal. Dampak koreksi fiskal juga akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Terutang, tetapi akan mengurangi Laba Bersih. Dampak koreksi fiskal juga dapat terlihat pada Pajak Yang Masih Harus Dibayar, karena PPh Terutang bertambah sehingga jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar juga akan bertambah. Begitu pula dengan PPh 25 yang akan dibayarkan pada tahun selanjutnya, akan bertambah karena adanya koreksi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 59-72.
- Dhiya'Ulhaq, A. R. (2021). Studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 84-108.
- Hardianti, R. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersil Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar (Doctoral dissertation).

- Kahar, A. S., & Gunawan, A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 828-832.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(1), 21-28.
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 566-573.
- Languju, R. C., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 1101-1111.
- Langsa, H. R. (2017). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT Toarco Jaya Makassar. *Economics Bosowa*, 3(2), 44-57.
- Louis, P. H. W. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1141-1149.
- Sinambela, P. (2019). Analisis Faktor Koreksi Fiskal Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terutang PT Jui Shin Indonesia. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(1), 1-127.
- Singgih, A., & Widjaja, P. H. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil PT. ABC Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 598-602.
- Sondakh, S. G. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 357-368.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tulandi, M. R., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 432-441.
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4183-4192.